

## Analisis Disparitas Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Ni Kadek Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Ida Bagus Putu Purbadharmaja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Korespondensi Penulis : [purbadharmaja@unud.ac.id](mailto:purbadharmaja@unud.ac.id)

**Abstract** The purpose of this study is to find out the factors that can affect economic growth and income disparity of districts/cities in Bali Province. The data used in this study is secondary data obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Bali Province. The method of data collection is a non-participant observation method with a total of 90 observations starting from 2013-2022. The analysis technique used is the path analysis technique. The results of the study show that (1) Directly investment has a positive and insignificant effect, minimum wage has a negative and significant effect, and government expenditure has a positive and significant effect on the economic growth of districts/cities in Bali Province. (2) Directly investment has a positive and insignificant effect, minimum wage has a negative and significant effect, government expenditure and economic growth have a negative and insignificant effect on the income disparity of districts/cities in Bali Province. (3) Indirectly, investment, minimum wage, and government expenditure have no effect on income disparity through economic growth of districts/cities in Bali Province.

**Keywords:** Investment; Minimum Wage; Government Expenditure; Economic Growth; Income Disparity;

**Abstrak** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Metode dalam pengumpulan data yakni metode observasi non partisipan dengan jumlah pengamatan sebanyak 90 pengamatan yang dimulai dari tahun 2013-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara langsung investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Secara langsung investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) Secara tidak langsung investasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** Investasi; Upah Minimum; Pengeluaran Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; Disparitas Pendapatan;

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Todaro & Smith, 2006). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana untuk mencapainya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta distribusi pendapatan yang adil. (Raswita, 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran dari masing-masing negara dimana negara tersebut berada (Lestari & Yasa, 2023) Namun, pada praktiknya, pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak pernah tercapai karena berbagai faktor. Faktor internal meliputi ketimpangan antar individu, wilayah, dan sektor ekonomi, sementara

faktor eksternal termasuk kompetisi antara wilayah, baik di tingkat daerah maupun negara (Wahyuni et al., 2014).

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki 8 kabupaten dan 1 kota dengan daerah yang memiliki karakteristik unik masing-masing. Pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022. Adapun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali menurut kabupaten/kota pada tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (persen)**

| No. | Kabupaten/Kota       | 2018 | 2019 | 2020   | 2021  | 2022 |
|-----|----------------------|------|------|--------|-------|------|
| 1.  | Jembrana             | 5,59 | 5,56 | -4,98  | -0,65 | 2,98 |
| 2.  | Tabanan              | 5,71 | 5,58 | -6,17  | -1,98 | 2,93 |
| 3.  | Badung               | 6,73 | 5,81 | -16,55 | -6,74 | 9,97 |
| 4.  | Gianyar              | 6,01 | 5,62 | -8,39  | -1,05 | 4,04 |
| 5.  | Klungkung            | 5,48 | 5,42 | -6,38  | -0,23 | 3,12 |
| 6.  | Bangli               | 5,48 | 5,45 | -4,10  | -0,33 | 2,80 |
| 7.  | Karangasem           | 5,44 | 5,50 | -4,49  | -0,56 | 2,58 |
| 8.  | Buleleng             | 5,60 | 5,51 | -5,80  | -1,27 | 3,11 |
| 9.  | Denpasar             | 6,42 | 5,82 | -9,44  | -0,92 | 5,02 |
|     | <b>Provinsi Bali</b> | 6,31 | 5,60 | -9,34  | -2,46 | 4,84 |

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami fluktuasi tahunan di setiap daerah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Kabupaten Badung sebesar 6,73 persen dan yang terendah terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Denpasar sebesar 5,82 persen. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi provinsi Bali mengalami penurunan hingga mencapai angka negatif. Kabupaten Badung mengalami penurunan yang paling tinggi yaitu -16,55 persen. Hal ini disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19, yang mengakibatkan banyak negara menerapkan kebijakan *lockdown* untuk menghentikan penyebaran virus. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kunjungan wisatawan ke Bali, yang merupakan tujuan utama bagi para wisatawan. Dampaknya sangat signifikan terhadap sektor pariwisata, khususnya untuk Bali (Mardiyah & Nurwati, 2020). Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali kembali meningkat dan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Badung sebesar 9,97 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua yaitu Kota Denpasar sebesar 5,02 persen, sedangkan kabupaten/kota di luar Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi

Bali. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Dapat diartikan jika pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diimbangi dengan pemerataan akan mempengaruhi ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Arif & Wicaksana, 2017).

Menurut Baldwin dalam Sugiastuti & Pratama (2022) ketimpangan pendapatan merujuk pada ketidaksetaraan dalam tingkat kemakmuran ekonomi yang tercermin dari adanya perbedaan tingkat pendapatan sehingga ada masyarakat yang kaya dan miskin. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Ketimpangan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat dikurangi hingga mencapai tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu untuk menjaga keseimbangan dalam proses pertumbuhannya (Putri Y et al., 2015)

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali yang terkenal hampir di seluruh dunia mengalami ketidakmerataan pendapatan di antara wilayahnya yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik yang dimiliki masing-masing wilayah termasuk pola pembangunan ekonomi dan potensi sumber daya yang berbeda (Arafah & Khoirudin, 2022).

Todaro & Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan Rasio Gini, yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, sebagai indikator ketimpangan agregat suatu wilayah. Semakin tinggi nilai rasio gini, semakin besar tingkat ketimpangan. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini, semakin kecil tingkat ketimpangan. Adapun rasio gini berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 1.2.

**Tabel 2.**

**Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (poin)**

| No. | Kabupaten/Kota       | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jembrana             | 0,3272 | 0,2903 | 0,3531 | 0,3170 | 0,3260 |
| 2.  | Tabanan              | 0,3249 | 0,3080 | 0,3239 | 0,3110 | 0,2990 |
| 3.  | Badung               | 0,3392 | 0,3244 | 0,3167 | 0,3320 | 0,3160 |
| 4.  | Gianyar              | 0,3050 | 0,2866 | 0,3171 | 0,3330 | 0,3070 |
| 5.  | Klungkung            | 0,3915 | 0,3847 | 0,3575 | 0,3460 | 0,3510 |
| 6.  | Bangli               | 0,3126 | 0,2744 | 0,2829 | 0,2850 | 0,2880 |
| 7.  | Karangasem           | 0,3393 | 0,3125 | 0,3268 | 0,3180 | 0,2970 |
| 8.  | Buleleng             | 0,3446 | 0,2847 | 0,2851 | 0,2820 | 0,2810 |
| 9.  | Denpasar             | 0,3422 | 0,3473 | 0,3301 | 0,3750 | 0,3680 |
|     | <b>Provinsi Bali</b> | 0,3774 | 0,3662 | 0,3690 | 0,3780 | 0,3630 |

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Tabel 2. menunjukkan bahwa rasio gini di Provinsi Bali mengalami fluktuasi di masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 rasio gini tertinggi terdapat di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 0,3915 poin. Setelah tahun 2018 nilai rasio gini pada Kabupaten Klungkung cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 rasio gini tertinggi terdapat di Kota Denpasar yaitu sebesar 0,3750 poin, sedangkan Kabupaten yang memiliki nilai rasio gini terendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli sebesar 0,2744 poin pada tahun 2019. Rasio gini terendah kedua yaitu terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 0,2810 poin pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan harus berlangsung secara bersamaan dan terencana, dengan penekanan pada penciptaan kesempatan kerja yang setara dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih adil. Apabila situasi tersebut terus berlanjut secara konsisten, maka wilayah-wilayah akan terpacu untuk terus tumbuh dan berkembang (Ariza & Arifin, 2017). Daerah yang sebelumnya kurang produktif dan terbelakang memiliki kesempatan untuk meningkat dan mencapai tingkat produktivitas yang sebanding atau bahkan melebihi daerah lain (Baharuddin, 2013).

Berdasarkan teori pertumbuhan dari Harrod Domar, di mana investasi berkontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi dengan menambah pendapatan dan meningkatkan kemampuan produksi melalui stok modal (Jhingan, 2004). Pertumbuhan ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh masuknya investasi asing. Pertumbuhan ekonomi yang positif mencerminkan kepercayaan investor dan mendorong investasi asing. Artinya, investasi swasta dianggap sebagai penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi (M. et al., 2014). Namun, investasi yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta dapat menyebabkan disparitas pendapatan karena seringkali terpusat di wilayah tertentu. Bahkan, beberapa daerah akan mengalami tingkat investasi yang rendah. Investor, baik domestik maupun internasional, cenderung memilih daerah yang dianggap memiliki kemampuan atau manfaat yang menarik sebagai tempat investasi (Hidayat, 2014).

Upah minimum yang rendah juga berkontribusi pada peningkatan disparitas pendapatan di beberapa wilayah (Fanshuri & Saputra, 2022). Tujuan pemerintah dalam menetapkan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja agar mendapatkan bayaran yang sesuai dengan standar hidup layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja guna mengatasi ketidakmerataan pendapatan (Fanshuri & Saputra, 2022). Menurut Castro et al. (2014) tingkat upah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah minimum memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena secara tidak langsung mendorong pekerja untuk meningkatkan

pengeluarannya, yang pada gilirannya akan memacu perputaran ekonomi dengan lebih banyaknya pembelian barang (Lubis & Murtala, 2021).

Pengeluaran pemerintah sebagai indikator untuk mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Ini adalah satu di antara campur tangan pemerintah yang paling berdaya guna serta mencerminkan strategi yang diterapkan pemerintah setempat. (Primandani & Yasa, 2021). Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), salah satu strategi utama untuk mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Wulandari & Rahmawati, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, disparitas pendapatan dan pertumbuhan menjadi isu penting dalam pembangunan karena dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian mengenai investasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ekonomi suatu negara dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta bertujuan agar pemerintah dapat memahami pengaruh faktor-faktor tersebut dengan harapan mencegah perburukan disparitas pendapatan di masa mendatang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Adapun sifat dari penelitian ini yakni penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam penelitian ini jumlah data *cross section* sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dan data *time series* sebanyak 10 tahun dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2022. Dengan demikian jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebesar  $9 \times 10 = 90$  pengamatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis jalur atau *path analysis* dengan menggunakan program E-views. Adapun persamaan struktur sebagai berikut.

Struktur 1

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Struktur 2

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- $Y_2$  = Disparitas Pendapatan
- $Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $X_1$  = Investasi
- $X_2$  = Upah Minimum
- $X_3$  = Pengeluaran Pemerintah
- $\beta_1 \dots \beta_7$  = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel
- $e_1, e_2$  = *Error*

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis statistik deskriptif adalah memberikan analisis perhitungan nilai maksimum dan minimum, rata-rata dan standar deviasi yang berhubungan dengan penelitian pengaruh investasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun analisis pada penelitian ini didasarkan pada 10 tahun periode penelitian yang dimulai dari tahun 2013-2022. Hasil statistik deskriptif tersebut dapat diamati pada Tabel 3.

**Tabel 3.**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|         | Investasi (X1) | Upah Minimum (X2) | Pengeluaran Pemerintah (X3) | Pertumbuhan Ekonomi (Y1) | Disparitas Pendapatan (Y2) |
|---------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Satuan  | Juta Rupiah    | Rupiah            | Ribu Rupiah                 | Persen                   | Poin                       |
| Mean    | 1.635.644      | 2.106.401         | 1.786.305.603               | 3,73                     | 0,3316                     |
| Maximum | 15.728.798     | 2.961.285         | 5.792.967.591               | 9,97                     | 0,4026                     |
| Minimum | 3.124          | 1.182.000         | 702.229.030                 | -16,55                   | 0,2682                     |
| Std.Dev | 2.585.946      | 480.060,20        | 1.006.544.473               | 4,62                     | 0,0313                     |

Penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel ditentukan oleh koefisien jalur dalam penelitian ini. Data di uji menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Untuk menyusun persamaan struktural yang digunakan, data yang diperoleh diolah dan dihitung dengan program E-views sehingga menghasilkan analisis seperti yang terlihat pada Tabel 4 dan 5.

**Tabel 4.**  
**Hasil Path Analysis (Struktur 1)**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 10.51928    | 1.982544   | 5.305953    | 0.0000 |
| X1       | 7.78E-08    | 1.75E-07   | 0.445043    | 0.6575 |
| X2       | -8.16E-06   | 8.79E-07   | -9.285634   | 0.0000 |
| X3       | 5.75E-09    | 1.10E-09   | 5.234371    | 0.0000 |

a. Dependet Variabel: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program E-views investasi memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 7,78 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak maka  $H_1$  diterima. Berdasarkan kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,6575 > 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upah minimum memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar -8,15 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  diterima. Berdasarkan kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 \leq 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 5,75 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak maka  $H_1$  diterima. Berdasarkan hasil kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 \leq 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Tabel 5.**  
**Hasil Path Analysis (Struktur 2)**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.399243    | 0.016920   | 23.59587    | 0.0000 |
| X1       | 1.54E-09    | 1.20E-09   | 1.281010    | 0.2037 |
| X2       | -2.84E-08   | 7.88E-09   | -3.605326   | 0.0005 |
| X3       | -4.97E-12   | 5.56E-12   | -0.893951   | 0.3739 |
| Y1       | -0.000369   | 0.000735   | -0.502203   | 0.6168 |

a. Dependet Variabel: Disparitas Pendapatan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program E-views investasi memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 1,54 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  diterima. Berdasarkan hasil kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,2370 > 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upah minimum dengan nilai standardized coefficient beta sebesar -2,84 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak maka  $H_1$  diterima. Berdasarkan hasil kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0005 \leq 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar -4,97 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak maka  $H_1$  diterima. Berdasarkan hasil kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,3739 > 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar -0,0003 mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak maka  $H_1$  diterima. Berdasarkan hasil kriteria pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,6168 > 0,05$ . Hasil ini mempunyai arti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

$$\text{Persamaan Struktur 1 : } \hat{Y}_1 = 7,78 X_1 - 8,16 X_2 + 5,75 X_3 + \varepsilon_1$$

$$\text{Persamaan Struktur 2 : } \hat{Y}_2 = 1,54 X_1 - 2,84 X_2 - 4,97 X_3 - 0,0003 Y_1 + \varepsilon_2$$

Keterangan:

$Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$Y_2$  = Disparitas Pendapatan

$X_1$  = Investasi

$X_2$  = Upah Minimum

$X_3$  = Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil pengaruh langsung pada Tabel 4 dan Tabel 5 koefisien jalur hubungan antar variabel investasi, upah minimum, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan dapat diringkas pada Tabel 6 berikut.



**Tabel 6.**  
**Ringkasan Koefisien Jalur**

| Hubungan antar Variabel | Koefisien | P-value | Keterangan                   |
|-------------------------|-----------|---------|------------------------------|
| $X_1 \rightarrow Y_1$   | 7,78      | 0,6575  | Positif dan Tidak Signifikan |
| $X_2 \rightarrow Y_1$   | -8,16     | 0,0000  | Negatif dan Signifikan       |
| $X_3 \rightarrow Y_1$   | 5,75      | 0,0000  | Positif dan Signifikan       |
| $X_1 \rightarrow Y_2$   | 1,54      | 0,2037  | Positif dan Tidak Signifikan |
| $X_2 \rightarrow Y_2$   | -2,84     | 0,0005  | Negatif dan Signifikan       |
| $X_3 \rightarrow Y_2$   | -4,97     | 0,3739  | Negatif dan Tidak Signifikan |
| $Y_1 \rightarrow Y_2$   | -0,0003   | 0,6168  | Negatif dan Tidak Signifikan |

Keterangan:

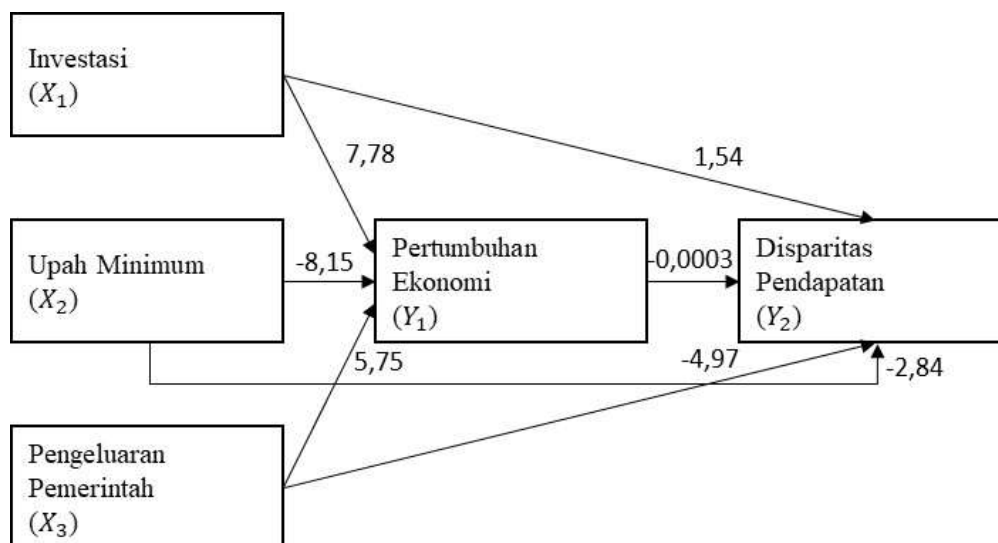
$Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_1$  = Investasi

$X_2$  = Upah Minimum

$X_3$  = Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis jalur yang telah dijelaskan di atas, maka hasil koefisien jalur penelitian ini dapat dijelaskan seperti Gambar 1.



**Gambar 1.**

**Hasil Analisis Jalur Analisis Disparitas Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

Berdasarkan hasil pengujian, maka diperoleh nilai pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel sebagai berikut.

**Tabel 7.**

**Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Penelitian**

| Hubungan antar Variabel | Langsung | Tidak Langsung             | Total   |
|-------------------------|----------|----------------------------|---------|
| $X_1 \rightarrow Y_1$   | 7,78     | -                          | 7,78    |
| $X_2 \rightarrow Y_1$   | -8,16    | -                          | -8,16   |
| $X_3 \rightarrow Y_1$   | 5,75     | -                          | 5,75    |
| $X_1 \rightarrow Y_2$   | 1,54     | $(7,78 \times (-0,0003))$  | -0,0023 |
| $X_2 \rightarrow Y_2$   | -2,84    | $(-8,16 \times (-0,0003))$ | 0,0024  |
| $X_3 \rightarrow Y_2$   | -4,97    | $(5,75 \times (-0,0003))$  | -0,0017 |
| $Y_1 \rightarrow Y_2$   | -0,0003  | -                          | -0,0003 |

Keterangan:

$X_1$  = Investasi

$X_2$  = Upah Minimum

$X_3$  = Pengeluaran Pemerintah

$Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$Y_2$  = Disparitas Pendapatan

Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi investasi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh positif, ketidaksignifikan menunjukkan bahwa investasi tidak secara kuat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Harrod-Dommar, ada hubungan positif antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam periode penelitian ini investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Darsana (2016) yang menyatakan investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penyebab investasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dapat disebabkan oleh fokus investasi yang lebih terarah pada penciptaan lapangan kerja dan

penyerapan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh tenaga kerja, bukan dari investasi langsung dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA). Terlebih lagi, kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat minat investor untuk berinvestasi di daerah yang infrastrukturnya masih kurang, karena dianggap tidak strategis dan memiliki prospek yang masih rendah. Serta proses yang rumit atau lambat dalam mendapatkan izin investasi dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh negatif mengindikasikan bahwa ketika tingkat upah minimum dinaikkan, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat atau bahkan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori upah efisiensi Cafferty (1990) yang berfokus pada peningkatan produktivitas dari tenaga kerja guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Windayana & Darsana (2020) yang mendapatkan hasil bahwa UMK berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Lukis Panjawa & Soebagiyo (2014) meningkatnya tingkat upah menyebabkan biaya produksi perusahaan naik, yang kemudian dapat mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja. Reduksi ini berpotensi mempengaruhi output total perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi produksi barang dan jasa secara keseluruhan dalam perekonomian. Dampak ini pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat, sedangkan apabila pengeluaran pemerintah semakin menurun maka pertumbuhan ekonomi juga semakin menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Supratiyoningsih & Yuliarmi (2022) yang memperoleh hasil pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah sangat membutuhkan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara efektif, sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan khusus daerah

tersebut. Dengan alokasi yang cerdas dan strategis, pengeluaran ini dapat memberikan dorongan signifikan kepada sektor-sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, dan memajukan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila investasi meningkat maka disparitas pendapatan juga akan meningkat. Ketidaksignifikan menunjukkan bahwa investasi tidak secara kuat berpengaruh meningkatkan disparitas pendapatan. Hasil penelitian sesuai dengan teori Harrod-Domar yang mengungkapkan, apabila investasi terpusat di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khaeni (2023) dan penelitian Sanjaya & Saskara (2022) yang memperoleh hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini diperkuat dengan studi Nunnenkam (2011) yang menyimpulkan bahwa investasi memiliki dampak positif dalam jangka pendek namun dampak negatif dalam jangka panjang terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan investasi asing dalam jangka pendek cenderung meningkatkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, seperti yang terjadi di Eropa. Namun, dalam jangka panjang, investasi asing dapat mengurangi risiko konflik sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan secara relatif. Misalnya, ketika investasi intensif terjadi di daerah A sedangkan minim di daerah B, hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah A secara signifikan lebih cepat daripada daerah B, yang pada akhirnya dapat memperbesar kesenjangan pendapatan antara keduanya. Seperti di Provinsi Bali, pertumbuhan investasi begitu didominasi bagian selatan pulau, terutama di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Besar investasi di Kabupaten dan Kota Denpasar ini tidak hanya dipengaruhi oleh sektor pariwisata yang memiliki fondasi utama perekonomian daerah mereka, tetapi juga oleh kurangnya minat investor untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor lain seperti sektor pertanian. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya kabupaten lain di Provinsi Bali untuk bersaing dalam menarik investasi yang signifikan.

Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan ketika upah minimum dinaikkan, maka dapat menyebabkan disparitas pendapatan akan menurun. Menurut Volscho (2005) yang dikutip dalam penelitian Sungkar & Nazamuddin (2015) yang menyatakan bahwa, institusi ekonomi berpendapat bahwa penetapan upah minimum memiliki potensi untuk mengurangi disparitas pendapatan. Upah minimum berfungsi sebagai alat redistribusi

pendapatan dengan cara mengurangi margin keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah bagi pekerja yang menerima pendapatan terendah. Dengan menerapkan upah minimum, standar upah secara keseluruhan akan meningkat, sehingga menciptakan struktur upah dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fanshuri & Saputra (2022) yang memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka semakin rendah disparitas pendapatan. Meskipun ada pengaruh negatif, ketidaksignifikan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak secara kuat berpengaruh terhadap penurunan disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil dalam penelitian ini sejalan pada teori Peacock dan Wiseman (1961). Teori mereka didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu batas maksimum di mana mereka masih bersedia menerima besarnya beban pajak yang diperlukan untuk mendanai aktivitas pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya pendanaan untuk kegiatan pemerintah dan memiliki keterbukaan dalam membayar pajak. Namun, tingkat toleransi ini menjadi hambatan bagi pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak secara semena-mena. Masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang makin tinggi. Dalam teori Peacock dan Wiseman, terdapat 3 efek yang menyebabkan pajak tidak dapat kembali ke tingkat semula, antara lain: (1) Efek penggantian, (2) Efek inspeksi, (3) Efek konsentrasi. Ketiga efek tersebut mengakibatkan peningkatan aktivitas pemerintah, sehingga meskipun gangguan telah teratasi tingkat pajak tidak kembali ke level sebelum gejolak ekonomi terjadi. Serta hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan karena pemerintah mungkin tidak dapat mengelola pengeluaran dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Msen et al. (2022) yang memperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan hubungannya negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi papua barat.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah disparitas pendapatan. Meskipun ada pengaruh negatif, ketidaksignifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara kuat berpengaruh terhadap penurunan disparitas pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori ketimpangan pendapatan yang dikembangkan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955, dikenal sebagai hipotesis "U terbalik", menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hubungan ini berubah menjadi negatif. Penelitian Huang et al. (2015) menyatakan di mana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Febriyani & Anis (2021), penelitian Ramadhan & Setyo (2021), dan penelitian dari Binatli (2012) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh kuat untuk menurunkan disparitas pendapatan dikarenakan distribusi tidak merata dari manfaat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. pertumbuhan sering kali dinikmati oleh golongan kaya yang bekerja di sektor industri, sementara golongan miskin yang bekerja di sektor pertanian mendapatkan manfaat yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara golongan kaya dan miskin semakin besar.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) bukan sebagai variabel intervening investasi (X1) terhadap disparitas pendapatan (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain, investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Febriana & Ariani (2022) yang memperoleh hasil bahwa, investasi secara tidak langsung tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) bukan sebagai variabel intervening upah minimum (X2) terhadap disparitas pendapatan (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain, upah minimum secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Adnyaswari & Purbhadharmaja (2023) yang memperoleh hasil pertumbuhan ekonomi tidak merupakan variabel mediasi perngaruh tidak langsung upah minimum terhadap diparitas pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) bukan sebagai variabel intervening pengeluaran pemerintah (X3) terhadap disparitas pendapatan (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriana & Ariani (2022) yang memperoleh hasil

yaitu variabel pertumbuhan ekonomi tidak mengintervening pengeluaran pemerintah ke ketimpangan pendapatan.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Secara langsung investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) Secara langsung investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Secara tidak langsung investasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor selain pariwisata, seperti pertanian, industri kreatif, teknologi, dan manufaktur. Diversifikasi ekonomi di Provinsi Bali dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata yang cenderung terpusat di bagian selatan pulau. Pemerintah perlu merancang kebijakan upah minimum yang seimbang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan. Upah minimum yang memadai akan memastikan bahwa pekerja memiliki daya beli yang cukup untuk meningkatkan permintaan domestik, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga akan berkontribusi mengatasi perbedaan pendapatan dengan menjamin jangkauan merata terhadap penghasilan yang layak bagi pekerja di sektor-sektor yang lebih rendah. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok sosial dan meningkatkan mobilitas sosial di masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan tingkat toleransi pajak masyarakat dengan cara memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengeluaran pemerintah. Masyarakat harus memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Maka dari itu, pemerintah perlu mengalokasikan APBD secara cerdas dan efisien terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan sosial. Dengan mengalokasikan APBD secara tepat dan terarah pada sektor seperti pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan sosial, pemerintah dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi disparitas pendapatan. Hal

ini akan membantu meningkatkan toleransi pajak kepada masyarakat, serta dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial di semua lapisan masyarakat.

## REFERENSI

- Adnyaswari, A. A. M. A., & Purbhadharmaja, I. B. P. (2023). Pengaruh Pmtb, Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(11), 2184.
- Angeles-Castro, G., Juárez-Cruz, J., & Flores-Ortega, M. (2014). The Effect of Average Wages on the Economy: The Case of the United States. *International Journal of Business and Social Science*, 5(11), 30–39. [www.ijbssnet.com](http://www.ijbssnet.com)
- Apriliani Msen, F., Marisa Parinusa, S., & Ester Sawaki, M. (2022). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 – 2020. *Lensa Ekonomi*, 16(1), 106–122.
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Ariza, I., & Atwal Arifin, A. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Bayu Windayana, I. B. A., & Darsana, I. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 57.
- Baharuddin, Eva. (2013). Analisis Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Periode 2006-2010. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Binatli, A. O. (2012). Growth and income inequality: a comparative analysis. *Economics Research International*.
- Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kemiskinan Ipm Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 148–160.
- Febriana, D., & Ariani, K. R. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan



- Jawa Timur 2017-2020. *Journal Seminar Nasional LPPM UMMAT, 1*, 558–568.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 3*(4), 9.
- Hidayat, M. H. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Skripsi, 1*–74.
- Huang, H. C. R., Fang, W., Miller, S. M., and Yeh, C. C. (2015). The effect of growth volatility on income inequality. *Economic Modelling, 45*, 212–222.
- Jhingan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khaeni, S. N. N. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Lestari, L., & Yasa, I. N. M. (2023). Pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 12*(06), 1139.
- Lubis, A. L., & Murtala, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 4*(3), 28.
- Lukis Panjawa, J., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 15*(1), 48–54.
- M., A. K., S.O., O., & Oluwafolakemi, F. O. (2014). Impact of Foreign Direct Investment on Nigeria Economic Growth. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4*(8), 234–242.
- Mardiyah, R. A., & Nurwati, R. N. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjajaran*.
- Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita, M. S. U. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud, 1*–10.
- Nunnenkam Peter dan Herzer Dierk . (2011). Income Inequality and Health: Evidence from developed and developing Countries. *E-Jurnal Economis*. Vol. 9 No. 4/ 4 Februari 2011.
- Primandani, N. P. I., & Yasa, I. N. M. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud, 10*(5), 2070–2100.
- Putri Y, Amar S, & Aimon H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian*

*Ekonomi*, 3(6).

- Ramadhan, Y. A. R., & Setyo Wahyu, S. (2021). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), 763–772.
- Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, M. N. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 40–53.
- Sanjaya, I.G.A., & Saskara, I.A.N. (2022). Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana*, 10(12), 4705-4737.
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis* , 16(1), 79–90. <https://profit.ub.ac.id>
- Supratiyoningsih, L., & Yuliarimi, N. N. (2022). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 1.
- Todaro, M. & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarimi, N. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(8), 458-477.
- Wulandari, D. F., & Rahmawati, F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 583–590.